

Hasil Penelitian

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

(THE EFFECT OF LOCAL FINANCIAL PERFORMANCE ON POVERTY: CASE STUDY OF REGENCIES AND MUNICIPALS IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE)

Sri Suartini, Hari Sulistiyo

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang, 41361
Jawa Barat - Indonesia
Email: srisuartini_daw@yahoo.com

Diterima: 26 Maret 2020; Direvisi: 02 Juni 2020; Disetujui: 21 Juni 2020

ABSTRAK

Pemberian kewenangan kepada Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya melalui penerapan kebijakan otonomi daerah diharapkan salah satunya mendorong terjadinya akselerasi penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode analisis menggunakan metode ekonometrika berdasarkan analisis model data panel. Hasil penelitian mengindikasikan kinerja keuangan daerah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak signifikan memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Hal ini diduga salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam menggali potensi keuangan daerahnya. Diperlukan peningkatan kreativitas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, antara lain melalui reformasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Selain itu, perlunya pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan keberpihakan, khususnya dalam hal anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: panel data, kebijakan fiskal daerah, reformasi keuangan daerah

ABSTRACT

The distribution of authority to the Regions in managing their regional finances through the implementation of regional autonomy policies expected one of them to encourage the acceleration of poverty reduction. Central Sulawesi Province is one of the provinces that has a high poverty rate. The research aimed to analyze the impact of regional financial performance on poverty levels in various regencies and municipals in Central Sulawesi Province. The analytical method used the econometrics method of panel data analysis. The results indicated that regional financial performance in various regencies and municipals in Central Sulawesi Province did not significantly influence poverty reduction in the region. We suspected that one of them caused by the low ability of regencies and municipals governments in exploring the financial potential of their regions. It was necessary to increase the creativity of regencies and municipals governments in South Sulawesi Province in exploring regional financial resources, including through reforms in the area of taxes and retributions. Besides, regencies and municipals governments of South Sulawesi Province needed to increase alignments, especially in terms of the budget for poverty alleviation programs.

Keywords: panel data, regional fiscal policy, local financial reform

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan otonomi daerah membuka kewenangan yang lebih besar bagi

Daerah untuk memikul tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah (Riphat *et al.*, 2016; Santi Suryantini *et al.*,

2018; Haryanto, 2018; Rosmeli dan Nurhayani, 2019; Prakoso *et al.*, 2019). Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Untuk itu, Daerah perlu menunjukkan kinerja dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya (Pirade *et al.*, 2018; Hendriyani dan Suartini, 2019).

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator yang sering menjadi referensi untuk menilai baik buruknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Raharja *et al.*, 2017). Kinerja keuangan daerah yang baik seharusnya dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan, termasuk penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah (Asmara dan Suci, 2014; Mizkan *et al.*, 2015).

Akan tetapi, penerapan otonomi daerah yang dilakukan sampai saat ini masih belum menunjukkan perbaikan kinerja keuangan di beberapa daerah. Hal tersebut diindikasikan melalui peningkatan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah secara drastis, namun tidak membuat jumlah dan presentase masyarakat miskin menurun secara cepat (Nursini dan Tawakkal, 2019).

Salah satu Daerah di Indonesia yang masih berhadapan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat kemiskinan di provinsi tersebut merupakan yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Menurut Badan Pusat Statistik (2019a), tingkat kemiskinan di provinsi tersebut berada pada angka 13,48 persen, lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen pada tahun 2019. Kenyataan tersebut dapat menjadi indikasi adanya permasalahan dalam kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu dianalisis dengan melihat dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di wilayah provinsi tersebut.

Penelitian-penelitian tentang keterkaitan kinerja keuangan daerah telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menemukan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Banten, dan seluruh provinsi di Indonesia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Nana Putri Ani dan Dwirandra, 2014; Febiandani dan Suseno, 2016; Pantas *et al.*, 2019; Lucky, 2013; Asmara dan Suci, 2014; Nursini dan Tawakkal, 2019).

Namun penelitian lain menunjukkan kinerja keuangan daerah Kota Pekanbaru justru tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Mizkan *et al.*, 2015). Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian terhadap konteks tersebut pada kasus kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi

Tengah belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Junarwati *et al.* (2013), kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber dana ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan berfungsi dalam mengukur sejauhmana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Halim, 2007).

Berkaitan dengan konsep kemiskinan, definisinya sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan komponen sosial dan budaya. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun

dampak yang ditimbulkannya. Kemiskinan sebagai suatu ketidakcukupan atau kekurangan terhadap aset-aset penting dan peluang-peluang yang menjadi hak setiap manusia. Kemiskinan dinyatakan sebagai tidak adanya kesempatan meraih kesejahteraan, yang diukur berdasarkan kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat (*World Bank*, 2014; Taufiq, 2017).

Harmadi (2013) menyampaikan bahwa karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin yang paling menonjol ialah lamanya bersekolah kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga menyebabkan rumah tangga tersebut cenderung miskin. Orang tua miskin cenderung hanya mampu untuk menyekolahkan satu anak (dan umumnya akan dipilih anak laki-laki) serta mempekerjakan anak lainnya dalam kegiatan ekonomi rumah tangga.

Konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik mengacu pada konsep ekonomi, adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang berdasarkan pada pengeluaran per kapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Kebutuhan standar hidup minimum direpresentasikan oleh garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan.

Batas kecukupan minimum makanan mengacu pada Widy Karya Nasional Pangan dan Gizi pada tahun 1978, yaitu besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi

kebutuhan minimum energi 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun kebutuhan minimum non-makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya (Taufiq, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa serangkaian data panel yang meliputi 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengamatan selama 2015-2018. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data yang dikumpulkan antara lain berupa realisasi anggaran pemerintah daerah, tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Jumlah data digunakan mengacu pada penentuan jumlah sampel sesuai saran dari Roscoe (1975), yakni sebanyak 52 (lima puluh dua) data. Pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian berada pada interval 30 sampai dengan 500 sampel. Kedua, jumlah sampel untuk analisis regresi berganda minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, termasuk variabel dependen (Sugiyono, 2012).

Guna menganalisis dampak dari kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika berdasarkan data panel. Model spesifikasi yang dibangun mengadopsi dari Suartini (2019), dengan menerapkan model log linear seperti pada persamaan (1).

$$PR_{it} = \beta_0 + \beta_1 RKKD_{it} + \beta_2 \ln RLS_{it} + \beta_3 \ln SPD_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

- Dimana:
PR = tingkat kemiskinan
RKKD = kinerja keuangan daerah
RLS = rata-rata lama sekolah
SPD = pengeluaran perkapita
 β_0 = konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi
e = error term
i = 1, 2, ..., N adalah jumlah kabupaten/kota
t = 1, 2, ..., T adalah periode penelitian

Definisi operasional variabel-variabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: a) Tingkat kemiskinan adalah suatu indikator yang menyatakan ketidakmampuan individu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2019b);

b) Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah, yang meliputi penerimaan dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Hidayat dan

Maski, 2013). Indikator kinerja keuangan daerah diprosikan oleh rasio kemandirian keuangan daerah, yakni tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Halim, 2007); c) Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Badan Pusat Statistik, 2020); dan, d) Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan analisis dalam penelitian ini dimulai dengan membangun estimasi model regresi data panel, yang dilakukan untuk memprediksi parameter intersep dan slope yang berbeda pada setiap kabupaten/kota dan periode waktu. Untuk melakukan estimasi model tersebut, diperlukan pemilihan model regresi data panel yang bertujuan untuk memperoleh model yang terbaik dari tiga alternatif model panel data yang ada. Model-model tersebut yaitu *common effect (pooled least square)*, *fixed effect* dan *random effect*.

Hal yang dilakukan pada pengujian pertama adalah memilih antara model *pooled least square* dengan *fixed effect* melalui penggunaan *Chow test*. Hasil perhitungan statistik pada model ini menunjukkan probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar 0,00, atau kurang dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal tersebut mengindikasikan tolak H_0 , yang berarti model yang terbaik dari kedua model di atas adalah model *fixed effect* (Tabel 1).

Pengujian model regresi data panel selanjutnya melakukan pemilihan model terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect*

$$PR_{it} = 60.79715 - 0.015393RKKD_{it} - 9.447344lnRLS_{it} - 2.836201lnSPD_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Prob. (0,0001) (0,3835) (0,0070) (0,1810)

Adj. R² = 51,2504 persen, Prob (F-statistic) = 0,00 persen

Hasil estimasi model di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel-variabel independen yang ada dalam model secara bersama-sama dapat memberikan dampak penjas yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat keyakinan 99 persen. Hal ini didasarkan pada nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,00 persen, lebih kecil dari α sebesar 1 persen.

Maka nilai Adj. R² menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan dapat diterangkan secara kolektif oleh kinerja keuangan daerah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita sebesar 51,25 persen. Sisanya sebesar

dengan penggunaan *Hausman test*. Hasil perhitungan statistik menunjukkan probabilitas *cross-section random* sebesar 0,68, atau lebih dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal ini mengindikasikan tidak dapat tolak H_0 , sehingga model terbaik dari kedua model tersebut adalah model *random effect*.

Tahap pengujian model regresi data panel berikutnya melakukan pemilihan kembali model terbaik antara model *random effect* dan *pooled least square* berdasarkan *Lagrange Multiplier (LM) test*. Hasil perhitungan statistik memberikan nilai LM-hitung sebesar 75,05, atau lebih dari nilai *Chi Squared* tabel sebesar 7,82 ($\alpha = 5$ persen, dan *degree of freedom* sebanyak 3 variabel independen). Hal ini mengindikasikan tolak H_0 , sehingga model terbaik dari kedua model tersebut adalah model *random effect*. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah penelitian dalam studi ini menggunakan model *random effect*.

Penggunaan model *random effect* membuat pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menjadi tidak relevan lagi. Dalam estimasi data panel, uji asumsi klasik yang penting untuk dilakukan adalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Oleh karena *random effect* menggunakan teknik estimasi *Generalized Least Squares (GLS)*, maka teknik estimasi tersebut menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas (Ekananda, 2016), sehingga pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini tidak dilakukan. Begitu pula dengan pengujian multikolinearitas, hal ini didasarkan Verbeek (2000) dan Gujarati (2006) bahwa pengujian asumsi klasik dalam model data panel tidak harus dilakukan.

Persamaan regresi dari model pada Tabel 1 dengan menggunakan *random effect* dapat disusun seperti pada persamaan (2).

48,75 persen dapat diterangkan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Hasil estimasi model di atas menunjukkan, rasio kemandirian keuangan daerah sebagai proksi dari kinerja keuangan daerah secara statistik tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, *ceteris paribus*, walaupun memiliki pengaruh negatif yang relevan sesuai teori. Tidak signifikannya pengaruh variabel independen tersebut ditunjukkan melalui nilai probabilitas dari koefisien regresi sebesar 0,38, lebih besar dari α sebesar 0,05. Hal ini berarti dampak negatif dari

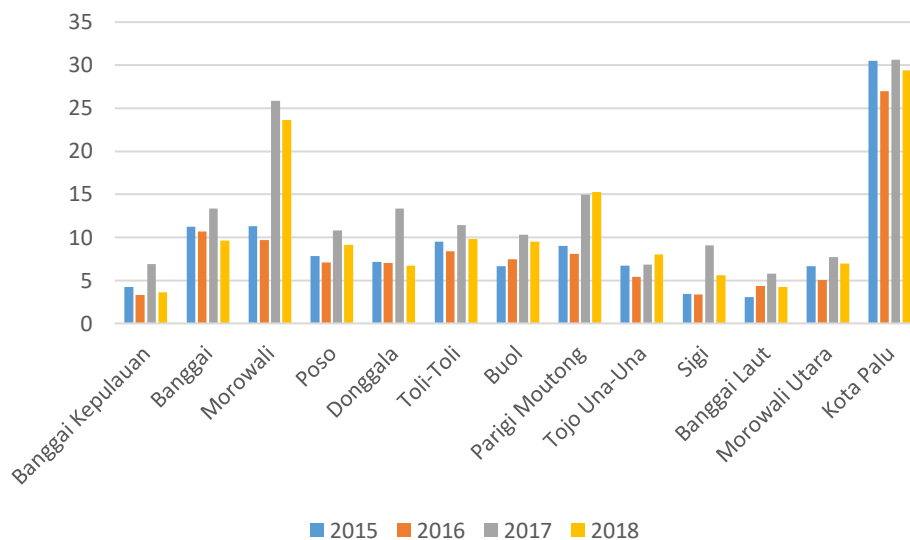
kinerja keuangan daerah tidak terbukti secara statistik memengaruhi tingkat kemiskinan di

berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 1. Pemilihan Model yang Terbaik

Tahap*	Pengujian Model	Metode Pengujian	Hasil	Keterangan
1.	<i>Fixed effect vs pooled least square</i>	<i>Chow test</i>	Nilai probabilitas <i>Cross-section Chi-square</i> = 0,00 < 0,05	Tolak H_0 , model yang terbaik adalah <i>fixed effect</i>
2.	<i>Fixed effect vs random effect</i>	<i>Hausman test</i>	Nilai probabilitas <i>Cross-section random</i> = 0,68 > 0,05	Tidak dapat tolak H_0 , model yang terbaik adalah <i>random effect</i>
3.	<i>Random effect vs pooled least square</i>	<i>Lagrange Multiplier test</i>	LM-hitung = 75,05 > nilai <i>Chi Squared</i> tabel = 7,82	Tolak H_0 , model yang terbaik adalah <i>random effect</i>

* Pengujian model dilakukan secara berurutan sesuai urutan tahap
Sumber: Data diolah (2020)



Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2018

Keterangan : Rasio kemandirian keuangan daerah = 0% - 25% (Rendah Sekali); 25% - 50% (Rendah); 50% - 75% (Sedang); 75% - 100% (Tinggi) (Suartini, 2019)

Gambar 1 menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada taraf rendah dan rendah sekali sesuai. Hal tersebut dapat diartikan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, termasuk kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditunjukkan dengan tingginya tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi salah satu alasan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Di sisi lain, dengan adanya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan mengelola keuangan daerah. Akan tetapi, rendahnya kemampuan menggali sumber-sumber pendapatan daerah berimbas pada ketersediaan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan menjadi terbatas. Terlebih, banyak daerah yang masih memberi porsi alokasi anggaran terbesar untuk belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai (Suartini, 2019).

Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah

(khususnya pajak dan retribusi daerah) disebabkan oleh berbagai masalah (Widadari *et al.*, 2016). Pertama, relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah. Kedua, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, sehingga pungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Ketiga, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah sehingga mengakibatkan penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Terdapat dugaan lain tidak signifikannya kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan. Khairudin *et al.* (2019) menyatakan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya diwakili oleh satu indikator, melainkan harus mempertimbangkan atau memasukkan indikator-indikator lain dalam penilaian kinerja keuangan daerah.

Variabel tingkat rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, *ceteris paribus*. Pengaruh yang signifikan dari variabel independen tersebut ditunjukkan berdasarkan nilai probabilitas dari koefisien regresi sebesar 0,01, lebih kecil dari α sebesar 0,05. Hasil ini dapat diartikan bahwa kenaikan 1 persen pada tingkat rata-rata lama sekolah dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9,45 persen, dengan menganggap variabel independen lain tidak berubah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa rendahnya tingkat pendidikan sangat berdampak pada rendahnya produktivitas dan *low skilled labor*, sehingga upah dan pendapatan yang diterima juga rendah. Kondisi ini berakibat pada tingkat kemiskinan relatif tetap tidak berkurang (Suartini, 2019).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019c), pada tahun 2018 hampir separuh tenaga kerja di Sulawesi Tengah yang bekerja yakni sebanyak 44,95 persen, hanya berlatar belakang pendidikan sekolah dasar. Sementara itu, hampir sepertiga tenaga kerja di Sulawesi Tengah yakni 29,04 persen bekerja di sektor pertanian, dimana sektor tersebut pada umumnya memiliki karakteristik produktivitas yang rendah dan tidak membutuhkan *skilled labor*.

Variabel pengeluaran perkapita memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, *ceteris paribus*. Akan tetapi, variabel independen tersebut secara statistik tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas dari koefisien regresi sebesar 0,18, lebih besar dari α sebesar 0,05. Hal ini diduga kenaikan tingkat pendapatan yang diperoleh

hanya untuk mengimbangi laju inflasi, khususnya harga-harga bahan pangan.

Berdasarkan Pusat Statistik (2019c), pada tahun 2018 pengeluaran rumah tangga di Sulawesi Tengah sebanyak 50,48 persen dialokasikan untuk mengonsumsi kelompok makanan, dan sisanya sebesar 49,52 persen digunakan untuk mengonsumsi kelompok nonmakanan. Hal ini sejalan dengan Suartini (2019) bahwa tingginya harga barang menyebabkan sebagian masyarakat (khususnya masyarakat miskin) sulit menjangkau barang kebutuhan pokok, sehingga tingkat kemiskinan tidak beranjak turun.

KESIMPULAN

Dampak kinerja keuangan daerah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak signifikan memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Rendahnya kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam menggali potensi keuangan daerahnya, berimbas pada terbatasnya ketersediaan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Porsi alokasi anggaran terbesar untuk belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai, memperkecil alokasi anggaran untuk program tersebut. Alasan lain adalah masalah keterwakilan indikator kinerja keuangan daerah diduga dapat memengaruhi tidak signifikannya dampak kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kreativitas dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, antara lain dengan melakukan reformasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan program sosialisasi pajak daerah secara sistematis dan masif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.
2. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan keberpihakan (khususnya anggaran) untuk program penanggulangan kemiskinan. Hal yang kerap kali kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaan program tersebut adalah penguatan basis data masyarakat miskin, yang meliputi penyusunan pedoman pendataan, mekanisme pengambilan, verifikasi dan pemantauan data masyarakat miskin. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan, agar lebih tepat sasaran.

3. Penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel kualitas belanja daerah (dalam hal ini rasio belanja modal terhadap total pengeluaran) sebagai proksi dari kinerja keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan pendanaan untuk pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, A. & Suci, S.C. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41-53.

Badan Pusat Statistik. 2019a. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019b. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Jakarta (ID): Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial.

Badan Pusat Statistik. 2019c. *Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2019*. Palu (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Metadata Indikator*. Diunduh dari <https://sirusa.bps.go.id/> pada tanggal 26 Maret 2020.

Ekananda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta (ID): Mitra Wacana Media.

Febiandani, R., & Suseno, D.A. 2016. Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217-225.

Gujarati, D. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta (ID): Erlangga.

Harmadi, S.H.B. 2013. Tantangan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Mini Economica: Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42, 166-178.

Haryanto, J.T. 2018. Regional Financial Performance Evaluation in the Indonesian Fiscal Decentralization Era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 115-128.

Hendriyani, R.M., & Suartini, S. 2019. Implication of Implementing the New Local Taxes Regulation on the Regional Income of Badung Regency, Bali Province, Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 45(2), 168-180.

Hidayat, M.F., & Maski, G. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(2), 1-19.

Junarwati, Basri, H., & Abdullah, S. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), 186-193.

Khairudin, Tarmizi, R., Indrayenti, Aminah, & Muhammad, K. 2019. Financial Performance of Local Government and Social Welfare: The Case in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, Special Issue 1, 168-172.

Lucky, D. 2013. Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(19), 7-17.

Mizkan, H., Kamaliah, & Agusti, R. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Sorot: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 10(1), 114-130.

Nana Putri Ani, N.L., & Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481-497.

Nursini, N. & Tawakkal. 2019. Poverty Alleviation in the Context of Fiscal Decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(1), 270-285.

Pantas, O.O., Kindangen, P., & Rotinsulu, T.O. 2019. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(1), 1-12.

Pirade, R., Mus, A.R., Mas'ud, M., & Nur, A.N. 2018. Evaluating Financial Performance in Local Government: A Study in South Sulawesi Province, Indonesia. *Research in Business and Management*, 5(2), 31-43.

Riphat, S., Setiawan, H., & Damayanty, S.A. 2016. Causality Analysis between Financial Performance and Human Development Index: A Case Study of Provinces in Eastern Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), 231-240.

Prakoso, J.A., Islami, F.S., & Sugiharti, R.R. 2019. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 87-100.

Raharja, A.K.Y., Suharno, & Harimurti, F. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengganguran, dan Kemiskinan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Soloraya Periode 2013 –2015). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, 198-204.

Roscoe, J.T. 1975. *Fundamental research statistics for the behavioral sciences (2nd ed.)*. New York (US): Holt, Rinehart and Winston.

Rosmeli, & Nurhayani. 2019. Financial Capacity of Provinces in Sumatra during Regional Autonomy Era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 259-268.

Santi Suryantini, N.P., Ayu Darmayanti, N.P., & Candraningrat, I.R. 2018. The Effect of Regional Financial Performance on Capital Expenditure and Economic Growth in Each District/Cities in Bali Province. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 6(11), 673-686.

Suartini, S. 2019. Local Financial Performance and Its Impact on Border Community Welfare. *Mimbar: Journal of Social and Development*, 35(2), 402-410.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung (ID): Penerbit Alfabeta.

Taufiq, N. 2017. Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan terhadap Dinamika Kemiskinan di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 7(1), 1-14.

Verbeek, M. 2000. *A Guide to Modern Econometrics*. Baffins Lane-Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd.

Widadari, K., Rares, J.J., Dengo, S. 2016. Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(44), 1-14.

World Bank. 2014. *Introduction to poverty analysis (English)*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/775871468331250546/Introduction-to-poverty-analysis>.